

**SKRIPSI**  
**PERJANJIAN KERJASAMA PADA PEMASARAN PRODUK RITEL DALAM RANGKA**  
**PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA PADANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-**  
**UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN**  
**MENENGAH**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan  
guna Memperoleh gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:**

**Rama Antonio Syaputra**

**BP: 1610111039**

**Pembimbing 1 : Prof. Dr. Yulia Mirwati, S.H., M.H., C.N**

**Pembimbing 2 : Linda Elmis, S.H., M.H.**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata Bisnis (PK II)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

# **PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PEMASARAN PRODUK RITEL DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA PADANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

(Rama Antonio Syaputra, 161011039, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69 hlm, 2020)

## **ABSTRAK**

Keberadaan ritel memiliki pro and kontra dalam penerimaannya di masyarakat, di satu sisi ritel memberikan pelayanan dan fasilitas yang bagus, di sisi lain karena dominasi pasaran ritel yang dapat mengenyampingkan posisi pasar dari ritel tradisional dan UMKM. Sehingga dianjurkan oleh pemerintah bahwasanya harus adanya suatu siasat kerjasama dengan melakukan suatu perjanjian agar unit UMKM tetap dapat berkembang. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis empiris, yaitu merupakan pendekatan terhadap masalah yang ada dengan jalan memahami hukum positif dari suatu objek penelitian dan bagaimana kenyataan atau praktiknya dilapangan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara serta studi kepustakaan, adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan UMKM di Kota Padang salah satunya dengan ikut serta dalam pembuatan klausula perjanjian tertulis antara pihak UMKM dengan Toko Ritel Modern agar tidak terjadi suatu kecurangan didalamnya. Apabila dikaitkan dengan UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, unit UMKM sendiri telah difasilitasi oleh pemerintah dalam pengembangannya agar tidak dikesampingkan dengan banyaknya ritel modern di pasaran. Pada Bab V Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan adanya aspek yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menumbuhkan iklim usaha dan sebagian aspek tersebut telah dijalankan oleh pemerintah dalam peningkatan kualitas sehingga dapat memberdayakan UMKM. Praktiknya masih terdapat permasalahan yang memerlukan perhatian dari pemerintah dalam memberdayakan UMKM agar berjalan sebagaimana mestinya.

***Kata Kunci : Perjanjian Kerjasama, Pemberdayaan UMKM, Ritel, Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah,***